

SATPOL PP DIY AWASI JALUR MUDIK

# 96 Personel Ditempatkan di Perbatasan

**YOGYA (KR)** - Menghadapi pemberlakuan kebijakan larangan mudik 6-17 Mei 2021, Satpol PP DIY mulai menyusun personel yang akan ditempatkan di tiga daerah perbatasan. Ketiga daerah perbatasan itu meliputi Tempel Sleman, Temon Kulonprogo dan Prambanan Sleman.

Adapun untuk pengawasan atau pengetatan di jalur-jalur tikus (jalan alternatif), Satpol PP DIY sudah berkoordinasi dengan Pemkab yang ada di perbatasan termasuk Jawa Tengah. "Saat penerapan larangan mudik nanti Satpol PP DIY akan menerangkan 96 personel yang dibagi menjadi empat shift setiap harinya. Rencananya nanti personel dari Satpol PP akan ditempatkan di tiga daerah perbatasan yaitu Temon, Prambanan dan Tempel. Mudah-mudahan dengan

cara ini target untuk menekan penularan Covid-19 akibat adanya pemudik bisa diantisipasi," kata Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad, Minggu (2/5). Menurut Noviar, Pemda DIY sudah berkoordinasi dengan sejumlah daerah terkait penyekatan saat kebijakan larangan mudik diterapkan. Misalnya untuk penyekatan di wilayah Kabupaten Sleman akan bekerja sama dengan Pemkab Klaten dan Magelang. Di Kabupaten Kulonprogo bekerja sama dengan Pemkab Purworejo, se-

dangkan di Kabupaten Gunungkidul dengan Pemkab Wonogiri dan Sukoharjo. Dengan adanya kerja sama antardaerah ini diharapkan pengawasan bisa lebih mudah dilakukan. "Selama kebijakan larangan mudik diberlakukan, saya minta masyarakat bisa menahan diri untuk tidak mudik. Selain untuk kebaikan bersama, hal ini juga untuk mengantisipasi sejak awal kemungkinan terjadinya penularan atau klaster mudik," ungkap Noviar. Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19 Berty Murtiningsih menyampaikan, Minggu (3/5) terjadi penambahan 180 kasus konfirmasi positif, sehingga total mencapai 39.842 kasus. Kasus sembuh bertambah 308 menjadi 35.045. Sedangkan kasus meninggal bertambah lima menjadi 965 kasus. **(Ria/Ira)-f**

# Pelaku Curanmor di Semarang Dibekuk



KR-Karyono

**Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar (tengah) bersama Kasat Reskrim AKBP Indra Mardiana menunjukkan barang bukti STNK, semantara ketiga tersangka duduk di depannya.**

**SEMARANG (KR)** - Polrestabes Semarang berhasil mengungkap kasus pencurian mobil mewah di Semarang dengan meringkus tiga dari empat pelaku. Mereka diringkus setelah pulang sambil membawa dua mobil hasil kejahatan ke daerah Jawa Timur. Para pelaku sebelum menikmati hasil kejahatan dibekuk setelah kankanya tertembus peluru. Mereka, yang dikenal residivis, masing-masing Edy Supriyatno alias Icas (41) asal Pati, Sutrisno alias Sutris (41) dan

Suchan alias Dheler (42), keduanya warga Sekarwudung Lumajang (Jatim). Selain, ke tiga pelaku, penyidik juga menyita dua mobil mewah hasil kejahatan Honda CRV putih H 8274 BD yang oleh pelaku diganti B 1219 PQR dan Lexus F Sport Nol Pol H 9 EM diubah L 1648 DF. Kedua mobil itu milik seorang korban Edy Marwan warga Jalan Kuala Mas Raya Panggung Lor, Semarang Utara. Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar pada gelar kasus,

Minggu (2/5) sore menjelaskan terungkapnya komplotan pelaku curanmor dari Jawa Timur bermula dari laporan korban Edy Marwan, Rabu (28/4). Korban warga jalan Kuala Mas Raya, Tanah Mas setelah bangun tidur pada pagi sekitar pukul 06.00 kaget melihat pintu rumah terbuka dan jendela dibuka paksa. Ia tambah kaget tidak jumpai dua mobilnya Honda CRV putih H 8274 BD dan Lexus F Sport Nol Pol H 9 EM yang diparkir digarasi. Kasus curanmor itu oleh korban terus dilaporkan ke Polrestabes Semarang.

Kapolrestabes yang didampingi Kasat Reskrim AKBP Indra Mardiana atas laporan itu langsung bergerak. Tim Resmob dipimpin Iptu Reza Arif Hadafi didukung bukti petunjuk, termasuk hasil rekaman CCTV yang terpasang di rumah korban terus memburu komplotan penjahat tersebut ke daerah Jawa Timur. Upaya pemburuan kurang dari 24 jam berhasil mengungkapnya. **(Cry)-f**

## Presiden:

pendidikan Indonesia harus memerdekakan manusia dan membangun jiwa serta raga bangsa. Pada kesempatan itu, Presiden kemudian bertanya kepada Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara yang terkenal di dunia pendidikan. Nadiem mengatakan filosofi yang terkenal tentunya merdeka belajar serta semboyan berbahasa Jawa *Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*. "Ini artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, dan di belakang memberi dorongan," kata Nadiem. Nadiem mengatakan sebenarnya esensi semboyan tersebut adalah jiwa kepemimpinan dari pendidik yang luar biasa pentingnya. Dia mengatakan konsep gotong royong yang sudah dibuahkan dalam profil Pelajar Pancasila sebetulnya adalah

arah merdeka belajar itu sendiri. Semboyan itu, menurutnya, juga bisa digunakan sebagai analogi sekolah, di mana sekolah yang sudah lebih maju dapat menjadi penggerak misalnya dengan memimpin dan menjadi teladan, sedangkan sekolah yang di tengah membimbing kelasnya melakukan transformasi di dalam. Adapun yang mungkin masih di belakang, kata dia, diberi dorongan untuk meminta kepada dinas atau pemerintah untuk membantu meng-upgrade. "Jadi itu salah satu filsafat gotong royong. Namun eksistennya yang dikuatkan. Ini menurut saya yang terpenting. Dan saya setuju dengan Pak Presiden bahwa kemerdekaan berpikir, berkarya, bertanya itu juga impian kami sehingga anak-anak bisa merdeka dalam menjadi apapun sesuai minat dan bakat mereka," kata Nadiem. Sementara itu, dalam peringatan

Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di DIY, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K Baskara Aji yang menjadi inspektur upacara di Stadion Mandala Krida, Minggu (2/5) mengemukakan, perlu introspeksi dan evaluasi terhadap kinerja pendidikan secara menyeluruh. Apalagi pendidikan di masa pandemi ini memerlukan solusi cepat agar diperoleh kebijakan yang tepat untuk tetap mempertahankan mutu pendidikan di DIY. "Guru merupakan garda terdepan dalam rangka menjaga mutu pendidikan. Untuk itu guru harus tetap mendapatkan perhatian dan perlakuan yang memihak terhadap kesejahteraan mereka. Sehingga, teman-teman guru bisa konsentrasi dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan bisa memberikan layanan terbaik kepada para peserta didik untuk semua jenjang dan jenis pendidikan," kata Baskara Aji. **(Ati/Ria/Ant)-f**

Sumbungan hal 1

Sumbungan hal 1

## Penyelenggara

KPK, juga meminta penyelenggara negara dan pegawai negeri agar memberikan teladan yang baik bagi masyarakat. Hal ini dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi dengan memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19 untuk melakukan perbuatan koruptif. "Ini karena tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan dan kode etik serta memiliki risiko sanksi pidana," kata Ipi. Selain itu, lanjutnya, KPK juga mengimbau kepada pimpinan Kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN/ BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas

untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas, kata Ipi, seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan. Pimpinan Kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN/ BUMD diharapkan menerbitkan imbauan secara internal untuk pegawai di lingkungan kerjanya. "Ini agar menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya," tuturnya. Selain itu, pimpinan asosiasi/perusahaan/masyarakat diharapkan juga melakukan langkah-langkah pencegahan dengan mengimbau anggotanya tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin atau suap dalam bentuk lainnya. Jika terdapat

permintaan gratifikasi, suap atau pemerasan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, menurut Ipi, KPK mengimbau agar segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang. "Begitu pun jika karena kondisi tertentu, pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi maka wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima," ujar Ipi. Adapun informasi terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses melalui tautan <https://gratifikasi.kpk.go.id> atau menghubungi layanan informasi publik KPK pada nomor telepon 198. **(Ful)-f**

Sumbungan hal 1

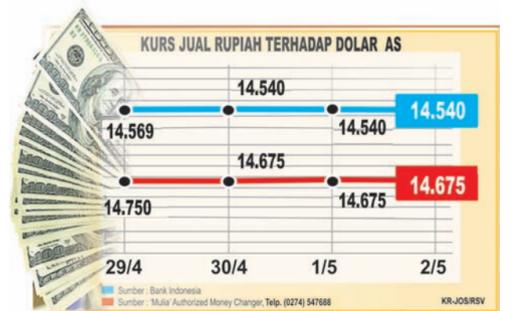
## Penghinaan

KHD sebagai penghargaan atas jasa-jasanya meletakkan dasar-dasar sistem pendidikan nasional. Hardiknas 2021 merupakan momentum tepat melakukan refleksi pembangunan sistem pendidikan nasional. Setidaknya untuk mengevaluasi diri, apakah cita-cita membangun jiwa merdeka sistem pendidikan nasional masih pada lintasan dasar-dasarnya sebagaimana yang diletakkan KHD? Jangan-jangan penghinaan terhadap anak bangsa pemilik jiwa merdeka masih terjadi. Secerach harapan ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengusung Merdeka Belajar mentransformasi sistem pendidikan nasional. Harapannya akhir dari seluruh episode Merdeka Belajar kelak akan sampai kepada pendidikan nasional yang memerdekakan : pendidikan jiwa merdeka. Pendidikan yang merdeka visinya, merdeka misinya, merdeka tujuannya, merdeka prosesnya, dan merdeka hasilnya. Tantangan Merdeka Belajar untuk sampai pada pendidikan yang memerdekakan tidak ringan.

Hal ini tidak terlepas dari praktik-praktik dan kebijakan-kebijakan pendidikan nasional masa lalu yang tidak sejalan dengan dasar-dasar sistem pendidikan nasional yang diletakkan KHD. Praktik dan kebijakan pendidikan zaman kolonial dipastikan bertolak belakang dengan dasar pendidikan jiwa merdeka. Pasca-proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, banyak capaian-capaian pembangunan pendidikan nasional yang mengembirakan. Pemerataan akses, peningkatan mutu, dan relevansi menampakkan pergerakan signifikan kearah yang lebih baik. Tetapi juga tidak sedikit praktik-praktik dan kebijakan pendidikan yang membelenggu jiwa merdeka anak bangsa. Dominasi pengembangan ranah kognitif dalam pendidikan telah mengabaikan pentingnya pendidikan budi pekerti, motorik, dan kinestetik. Banyak dihasilkan cerdas pandai, tetapi karakternya buruk. Inkonsistensi dan ketidakpatuhan terhadap kaidah-kaidah pembangunan pendidikan nasional terjadi secara massif. Konstitusi mengamanatkan, pemerintah dan pemerintah daerah

wajib mengalokasikan anggaran untuk pendidikan paling sedikit 25% dari APBN/APBD. Tampak di permukaan seluruh provinsi dan kabupaten/kota telah memenuhi amanah konstitusi tersebut. Pada hal apabila diteliti lebih jauh, pemenuhan 25% persen APBD tidak murni. Karena dihitung dengan perolehan dana dekonsentrasi dari pemerintah pusat. Bukankah yang demikian sesungguhnya penghinaan. Apabila Merdeka Belajar hendak dijadikan instrumen menuju pendidikan jiwa merdeka, pada episode tertentu harus mampu mengubah paradigma pembangunan pendidikan nasional. Dari berbasis pemenuhan yang praktis formalistis kepada kinerja terukur berlandaskan visi, misi, tujuan, proses, dan hasil pendidikan yang memerdekakan. Pembangunan pendidikan nasional berbasis pemenuhan yang praktis formalistis ternyata masih sangat kuat aroma penghinaan-nya. Reformasi sistem pendidikan nasional memerlukan *political will* semua. Bukan hanya menasar lembaga pendidikan. **(Penulis adalah Pamong Tamanisiuswa di Yogyakarta)-f**

Sumbungan hal 1



Prakiraan Cuaca			Senin, 3 Mei 2021			
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul					24-31	60-95
Sleman					23-31	65-95
Wates					24-31	60-95
Wonosari					23-31	65-95
Yogyakarta					23-31	65-95

## Peranan Standardisasi di Era Industri 4.0

**Muhammad Rudyanto Arief**  
Kepala Pusat Jaminan Mutu Universitas AMIKOM Yogyakarta

ORGANISASI dan Profesi di Era Industri 4.0 saat ini dituntut untuk menunjukkan kinerjanya secara baik berdasarkan permintaan pemangku kepentingan/stakeholder. Salah satu upaya yang dilakukan oleh organisasi dan profesi adalah dengan memastikan apakah organisasi yang mereka kelola atau profesi yang mereka tekuni saat ini sudah sesuai dengan standar atau tidak. Kenapa harus sesuai dengan Standar? Karena masyarakat dunia saat ini mengukur kinerja sebuah organisasi sudah baik atau tidak menggunakan indikator standar yang legitimasiya melalui proses sertifikasi. Jika sudah memenuhi standar maka persepsi pemangku kepentingan terhadap organisasi adalah bahwa organisasi tersebut sudah mampu memenuhi harapan dari pemangku kepentingannya. Itulah sebabnya saat ini banyak organisasi modern yang berusaha untuk memenuhi persyaratan yang ada dalam standar berdasarkan karakteristik organisasinya masing-masing. Demikian juga dengan dunia kerja profesional. Saat ini banyak profesi pekerjaan yang dituntut untuk menunjukkan kinerjanya secara profesional melalui program sertifikasi profesi untuk masing-masing industri/ bisnis dimana individu profesional tadi bekerja. Secara definisi Standar adalah adalah ukuran atau tingkatan tertentu yang dipakai sebagai patokan. Sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai (harga). Baku atau dasar (KKBl). Standar adalah sebuah aturan, biasanya digunakan untuk bimbingan tetapi dapat pula bersifat wajib (paling sedikit dalam praktik), memberi batasan spesifikasi dan penggunaan sebuah objek atau karakteristik sebuah proses dan/atau karakteristik sebuah metode. Sedangkan Standardisasi adalah penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas, dan sebagainya) dengan pedoman (standar) yang ditetapkan; pembakuan (KKBl) dengan kata lain upaya bersama yang dilakukan oleh organisasi/ entitas profesi untuk membentuk atau memenuhi standar disebut dengan standarisasi. Ketika sebuah organisasi sudah melaksanakan pemenuhan standar-standar yang diadopsi dalam manajemen sesuai karakteristik organisasinya maka dapat dikatakan organisasi tersebut sudah bermutu. Mutu ini salah satu upaya organisasi modern untuk memastikan kepuasan pemangku kepentingannya dapat tercapai (customer satisfaction). Mutu sendiri dapat diartikan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan penyelenggaraan (tata kelola) dalam sebuah organisasi dengan standar yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi sesuai dengan karakteristik organisasinya. Sehingga jika sebuah organisasi sudah mampu memenuhi indikator-indikator standar yang dirujuk dalam tata kelola manajemen organisasinya maka organisasi tersebut dapat dikatakan sudah bermutu. Untuk memastikan apakah mutunya dapat diakui secara resmi maka organisasi tersebut dinilai oleh lembaga penilai eksternal yang berwenang melalui program akreditasi atau sertifikasi. Karena dilakukan oleh pihak eksternal maka disebut juga dengan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME). Salah satu organisasi yang banyak menerbitkan standar dengan skala internasional adalah ISO (International Organization for Standardization). Standar ISO saat ini sudah diakui dan di adopsi di lebih dari 200 negara di dunia. Tiap negara memiliki lembaga standarisasi yang berafiliasi ke badan standarisasi dunia seperti ISO. di Indonesia lembaga yang menangan standar ini adalah BSN (Badan Standardisasi Nasional). BSN Indonesia telah mengadopsi banyak standar dunia untuk diterapkan di organisasi di Indonesia, demikian juga dengan profesi. Organisasi modern dan profesi modern di Era Industri 4.0 atau di Era Society 5.0 saat ini membutuhkan pedoman yang tepat agar dapat dipercaya oleh pemangku kepentingannya. Pedoman yang dapat digunakan saat ini adalah dengan mengadopsi Standar-standar yang relevan dengan karakteristik bisnisnya masing-masing. Misal organisasi di Bidang Pendidikan dapat mengikuti pedoman standar dari ISO yaitu ISO 9001 dan lebih khusus lagi ISO 21001 khusus untuk bidang pendidikan (educational organization management system). Contoh lain organisasi di bidang Teknologi Informasi yang berfokus pada Keamanan Informasi, maka dapat menerapkan ISO 9001 untuk tata kelolanya dan khusus untuk keamanan informasinya menerapkan ISO 27001. ISO selalu mengeluarkan versi ISO terbaru berdasarkan tuntutan bisnis dan profesi saat ini. Seperti saat ini lagi marak dengan isu pelanggaran keamanan informasi pribadi maka ISO mengeluarkan standar 27701 (Privacy Information Management System). Sedangkan Isu Korupsi maka ISO mengeluarkan standar ISO 37001 (Anti-Bribery) untuk anti korupsi dimana versi revisi ISO ini juga sudah mengakomodasi anti korupsi di masa pandemi covid-19. Sehingga apapun jenis standar yang akan diterapkan oleh organisasi dan profesi tertentu maka tujuan utamanya adalah untuk memastikan agar pemangku kepentingannya puas tercapai (customer satisfaction), efektifitas dan efisiensi dalam tata kelola organisasinya tercapai sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja organisasi tersebut. (\*)